

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat telah berjalan sesuai dengan Perundang-Undangan yaitu menyelenggarakan tahapan persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat meliputi : Perencanaan Program dan Anggaran, Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan, Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Tahapan penyelenggaraan meliputi : Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Sengkata Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat, Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih yang berjalan dengan baik.

KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015 telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik serta sesuai Perundang-Undangan yang berlaku. Agar tercipta kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, maka penyelenggara pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

Hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat adalah kendala yang bersifat teknis dilapangan, kendala-kendala tersebut disebabkan oleh cuaca buruk dan letak kondisi geografis daerah kabupaten Pesisir Barat yang sulit ditempuh.

B. SARAN

1. Kepada KPU Kabupaten Pesisir Barat seharusnya lebih memaksimalkan sosialisasi tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga memberikan pemahaman lebih terdapat Pilkada.
2. Peningkatan kinerja anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan tugas sehingga program kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Kepada Panitia Pengawas Pemilu sebaiknya meningkatkan ketegasan dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan terhadap Pilkada sehingga tidak terjadi kecurangan seperti adanya money politic yang terjadi pada saat Pilkada.